

SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA STABIL DALAM MENGHADAPI PENINGKATAN KETIDAKPASTIAN GLOBAL

"Sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari *higher for longer* suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik"

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Pertumbuhan ekonomi Q3-2023 Amerika Serikat meningkat 4,9% dengan pasar tenaga kerja terus membaik dan tekanan inflasi persisten tinggi mendorong meningkatnya *sell-off* di *bond market*.
- Kenaikan *yield* surat utang di Amerika mendorong pelemahan terutama di pasar nilai tukar dan pasar obligasi *emerging markets* termasuk Indonesia.
- Risiko geopolitik global semakin meningkat seiring dengan konflik Israel dan Hamas, yang berpotensi mengganggu perekonomian dunia secara signifikan apabila terjadi eskalasi di Timur Tengah.
- Kinerja ekonomi Eropa diprediksi masih mengalami stagflasi.
- Pemulihan ekonomi Tiongkok masih belum sesuai ekspektasi dan kinerja ekonomi yang masih di level pandemi meningkatkan kekhawatiran bagi pemulihan perekonomian global.

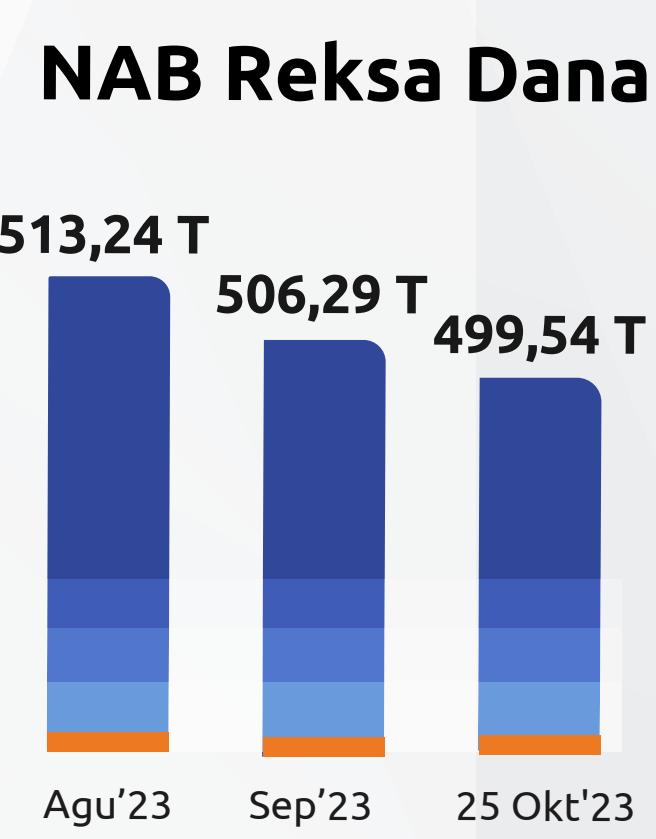
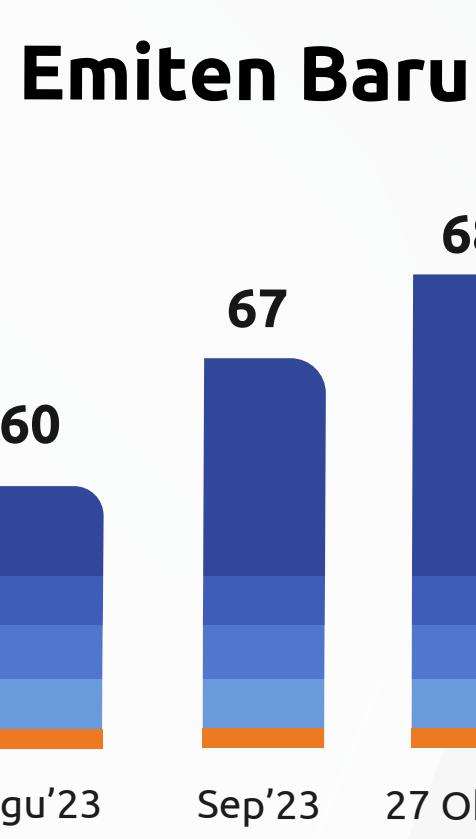
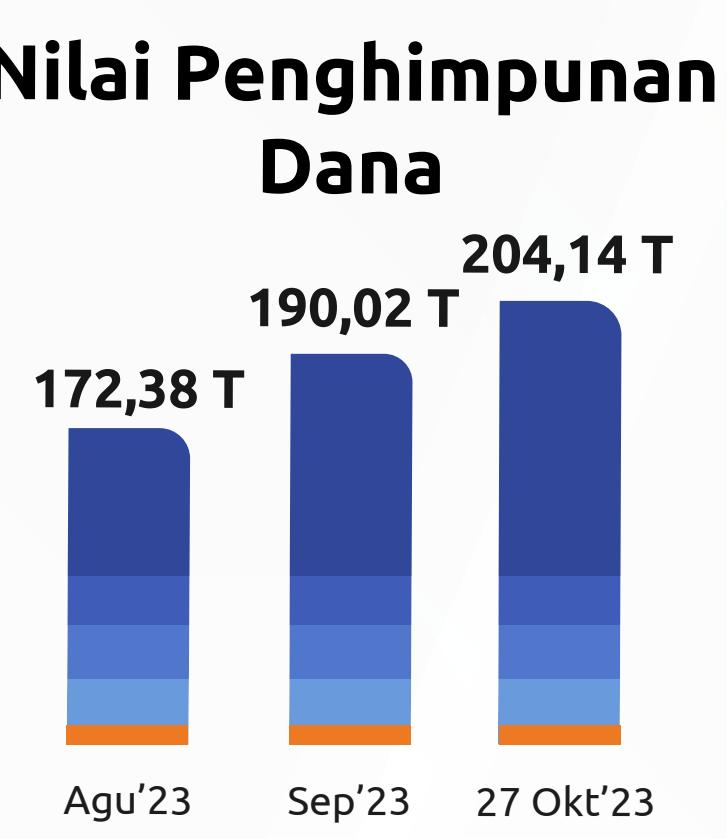


Domestik

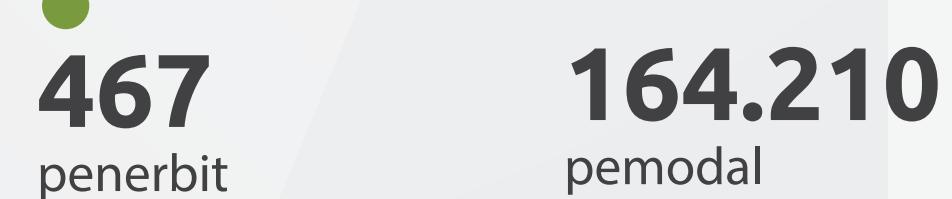
- Tingkat inflasi tercatat sebesar 2,28 persen yoy. Perlu dicermati tren kenaikan inflasi bahan makanan terutama komoditas beras dan gula ditengah potensi penurunan produksi global akibat El Nino.
- PMI Manufaktur berada di zona ekspansi dan neraca perdagangan mencatatkan surplus.
- Indonesia menjadi anggota penuh (*full member*) *Financial Action Task Forces* (FATF), sejajar dengan negara-negara anggota G20.

PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasar Modal



Securities Crowdfunding (SCF)

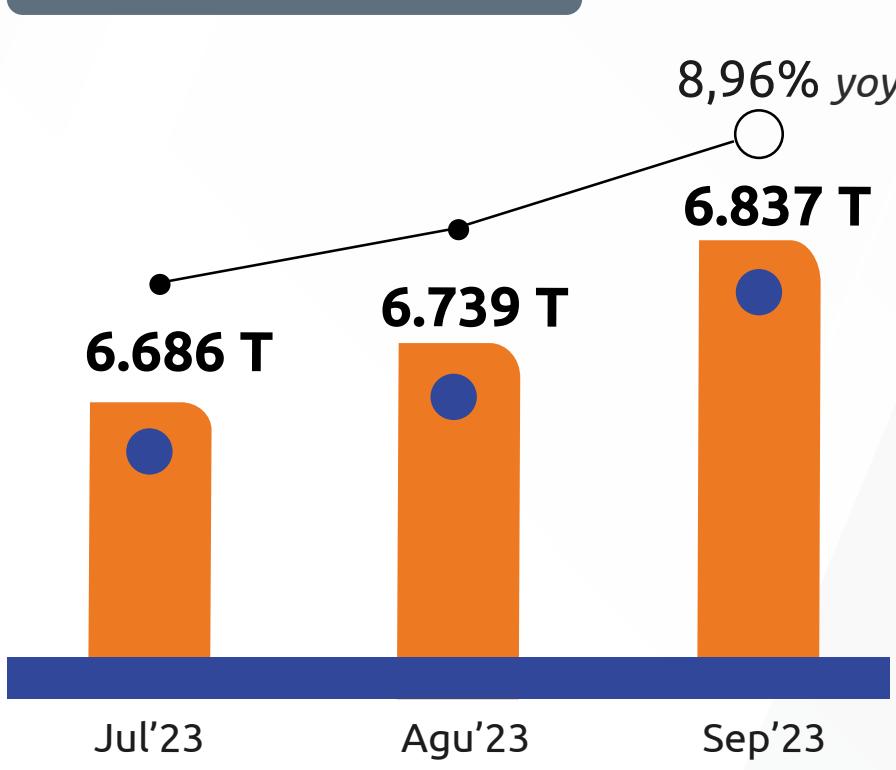


Perdagangan Karbon

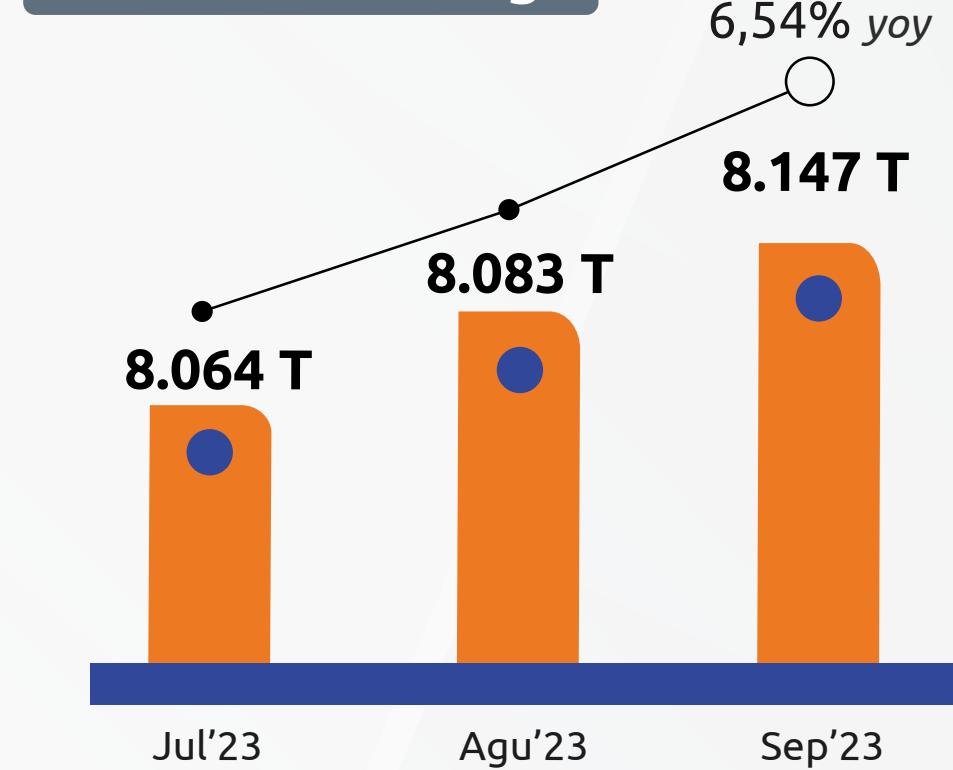


Perbankan

Kredit Perbankan



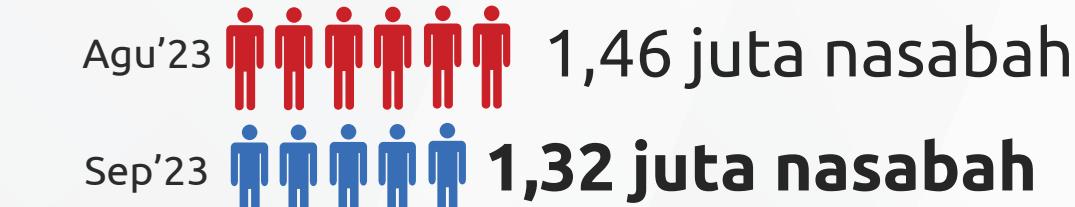
Dana Pihak Ketiga



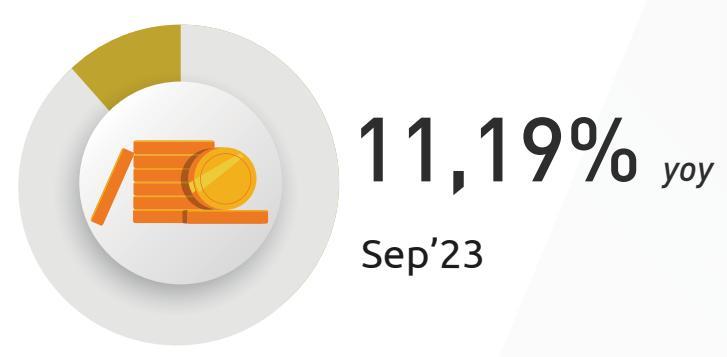
Kredit restrukturisasi Covid-19 terus menurun



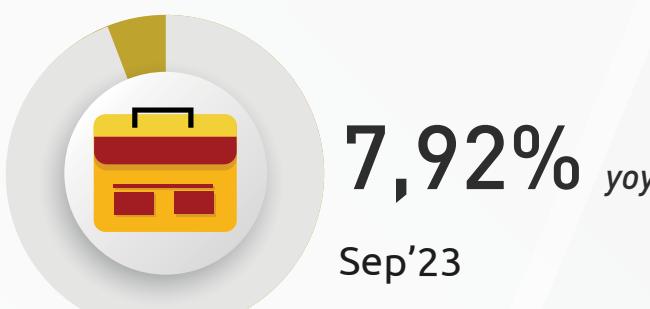
Jumlah Debitur



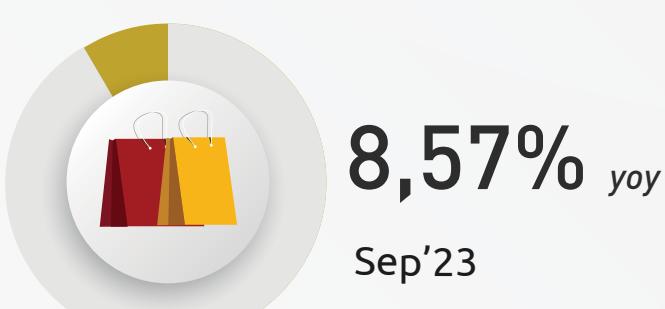
Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



Kredit Konsumsi



CAR

27,41%
Sep'23

AL/DPK

25,83%
Sep'23

AL/NCD

115,37%
Sep'23

NPL Gross

2,43%
Sep'23

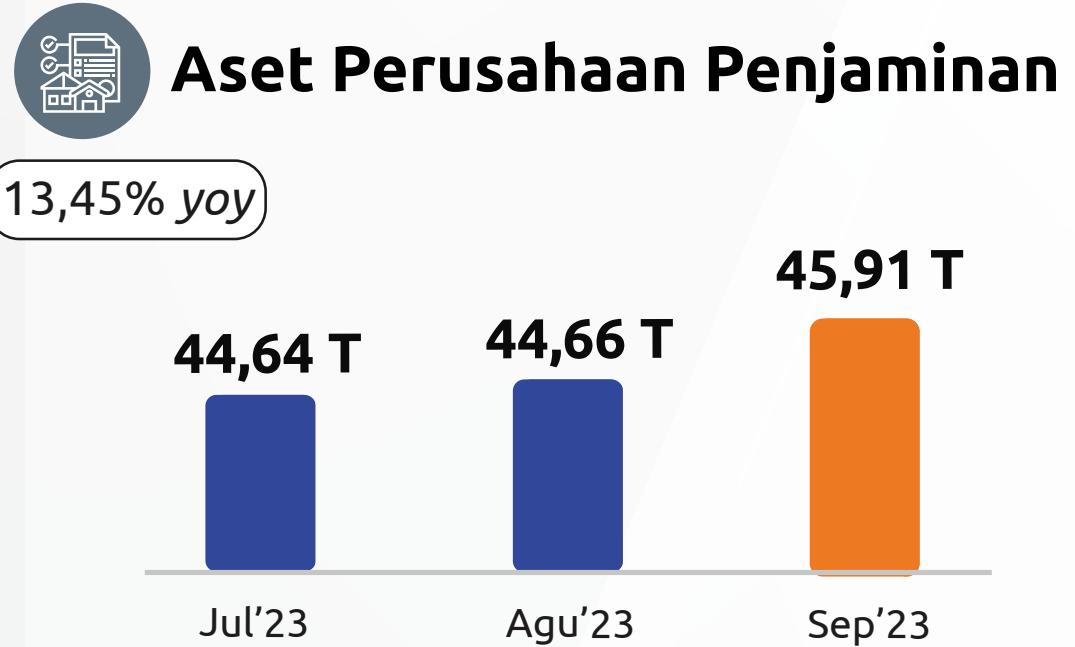
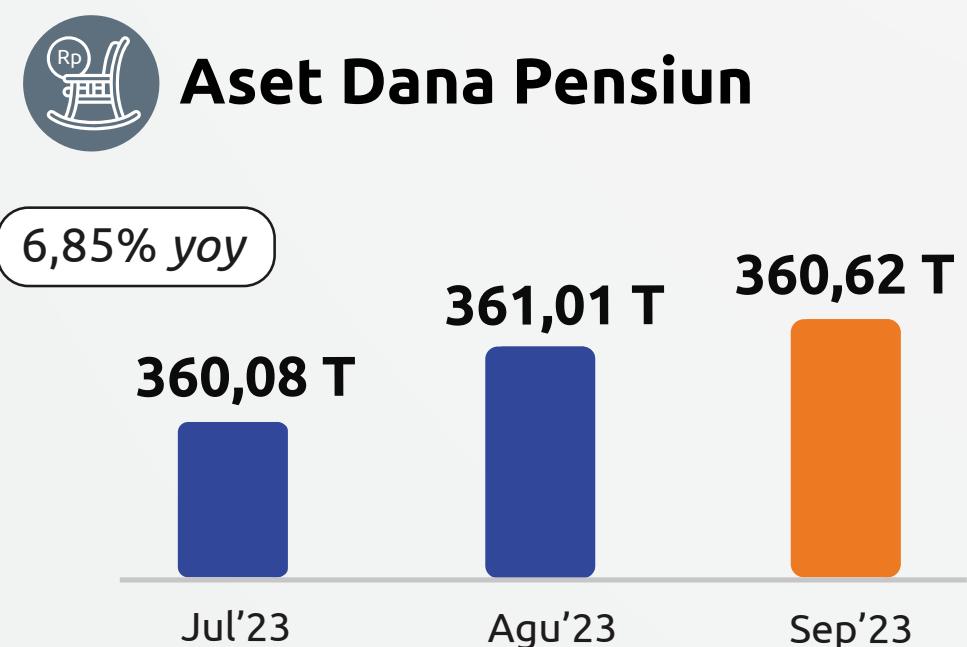
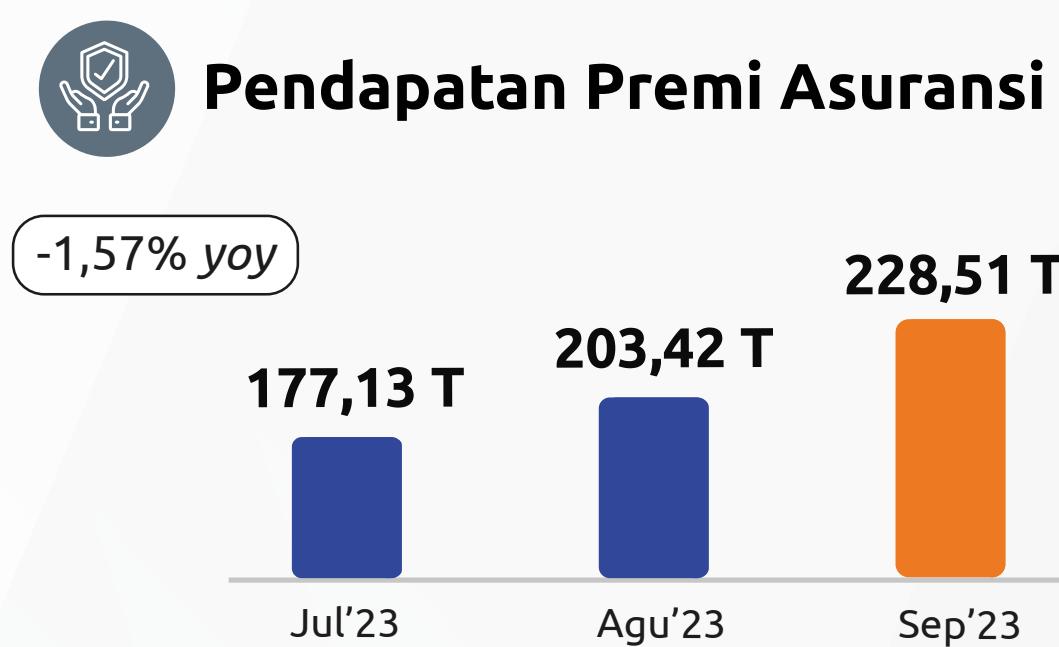
NIM

4,85%
Sep'23

RoA

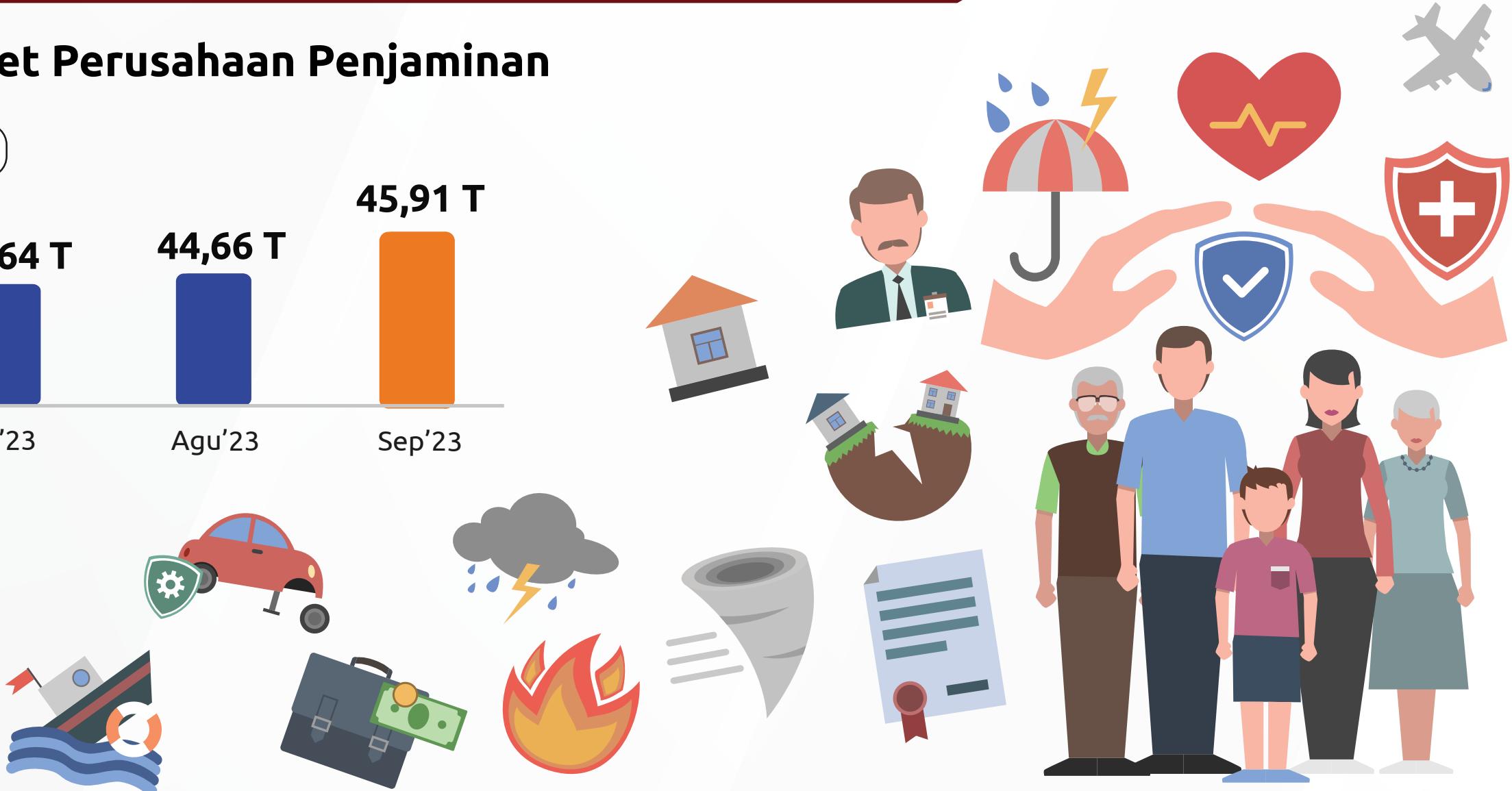
2,73%
Sep'23

Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

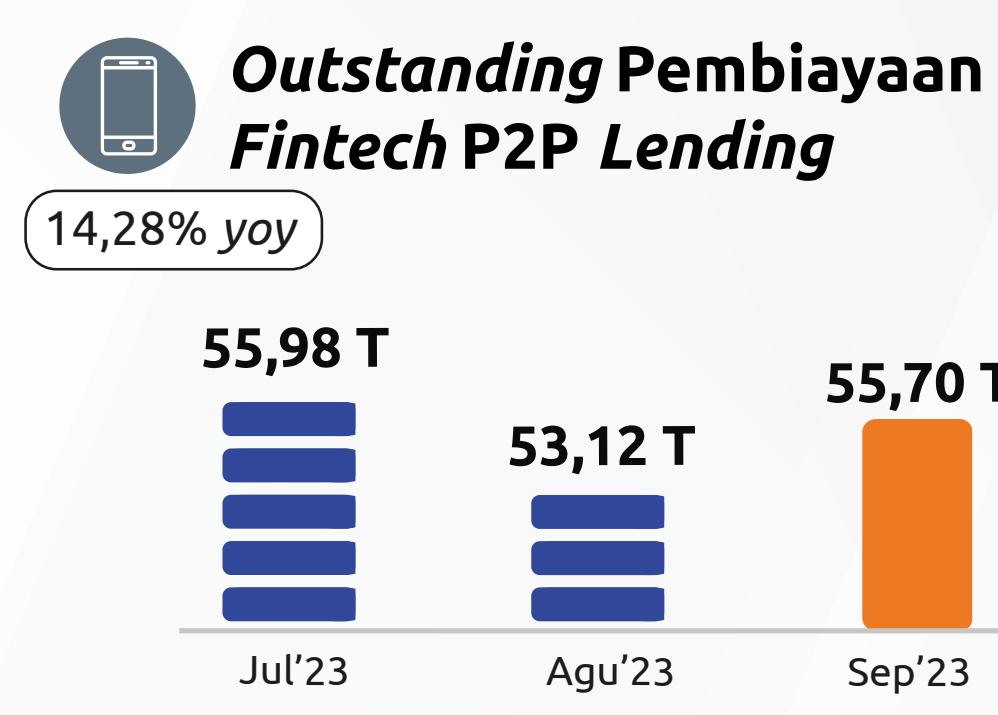
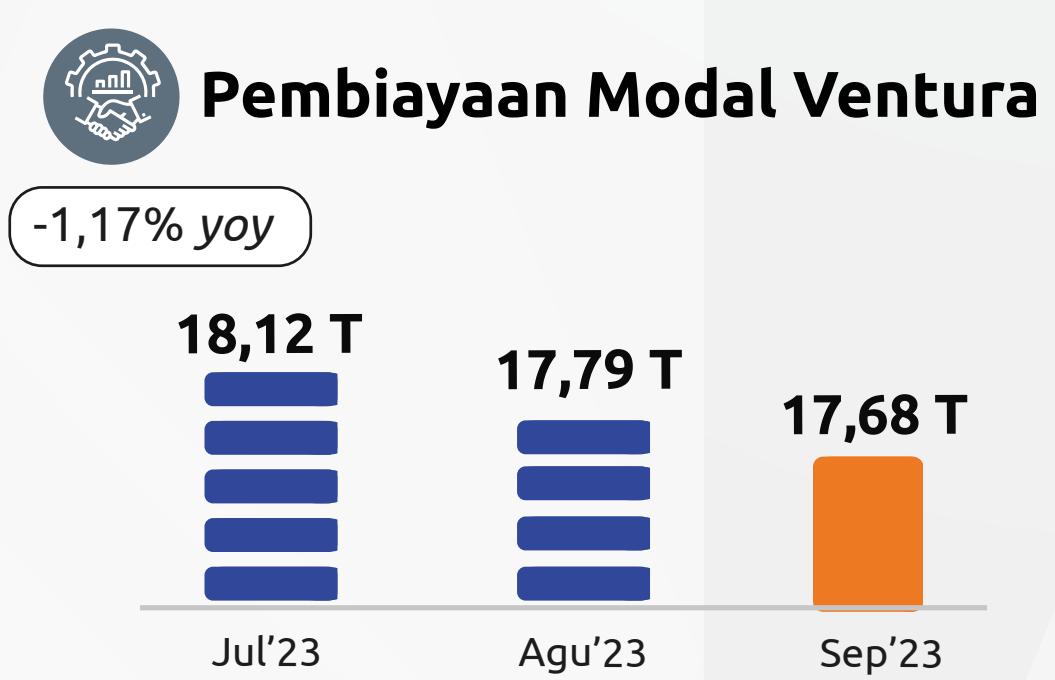
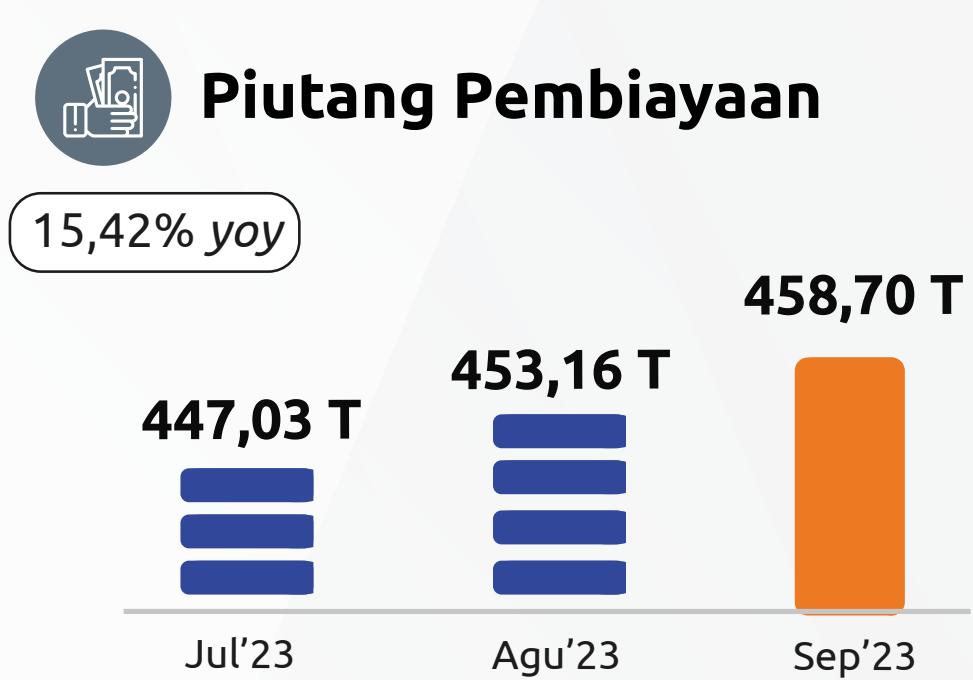


RBC Asuransi Umum
308,97%

RBC Asuransi Jiwa
451,23%



Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya



NPF Perusahaan Pembiayaan (gross)
2,59%

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan
2,23x

TWP 90 Fintech P2P Lending
2,82%

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

99
Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang tercatat di OJK



39
Aggregator

4
Financial Planner

5
Regtech E-Sign

17
Credit Scoring

2
Tax & Accounting

3
Insurtech

6
E-KYC

1
Online Distress Solution

7
Financing Agent

2
Wealth Tech

1
Insurance Hub

1
Regtech Pep

3
Funding Agent

8
Transaction Authentication

Transaksi Kripto (September 2023)



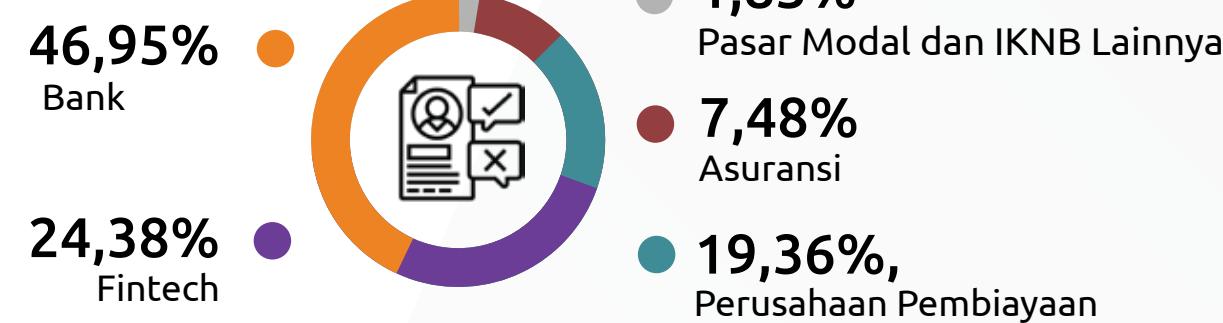
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

247.546 layanan
(Januari s.d 20 Oktober 2023)

88 pengaduan berindikasi pelanggaran

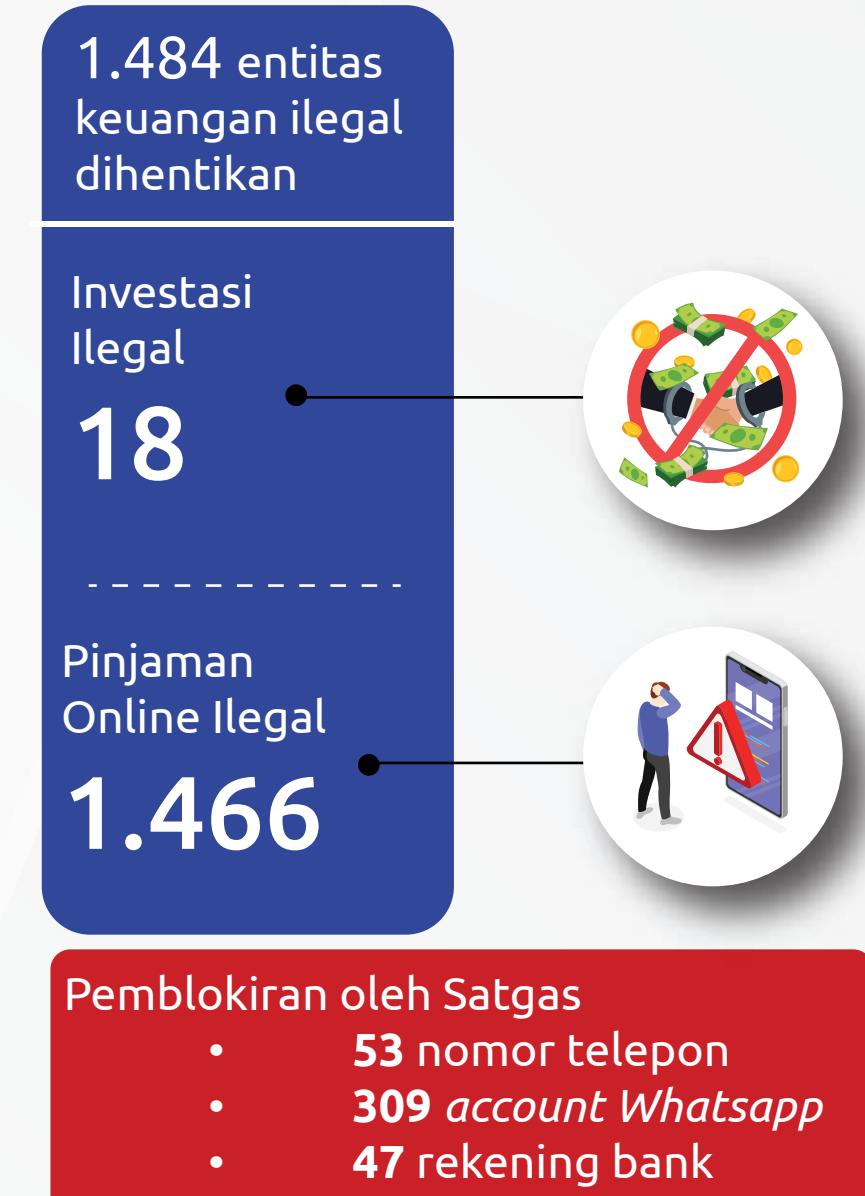
1.824 sengketa masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

18.010 pengaduan

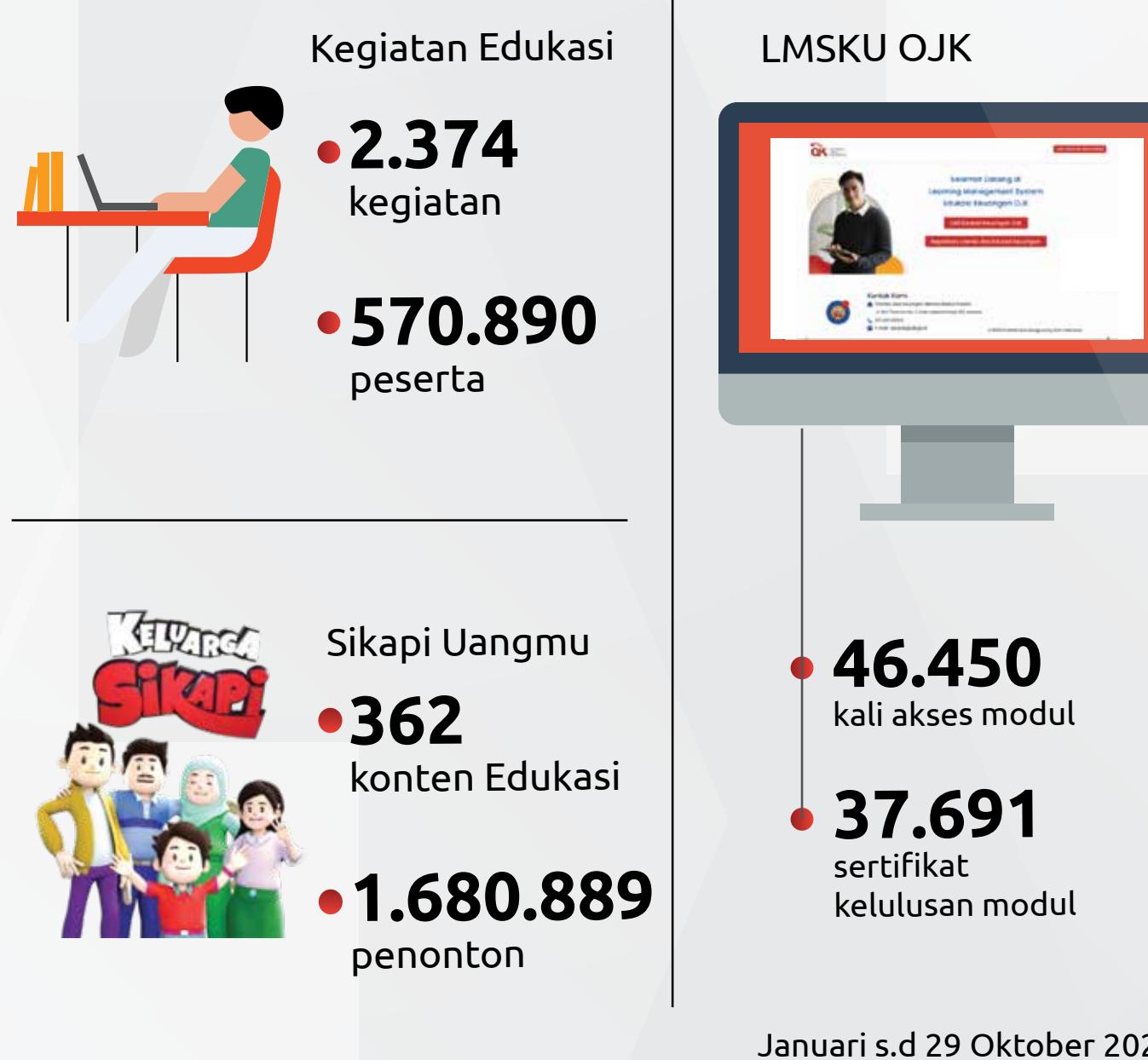


Selesai oleh Internal Dispute Resolution 87,05%; Dalam Proses 12,95%

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

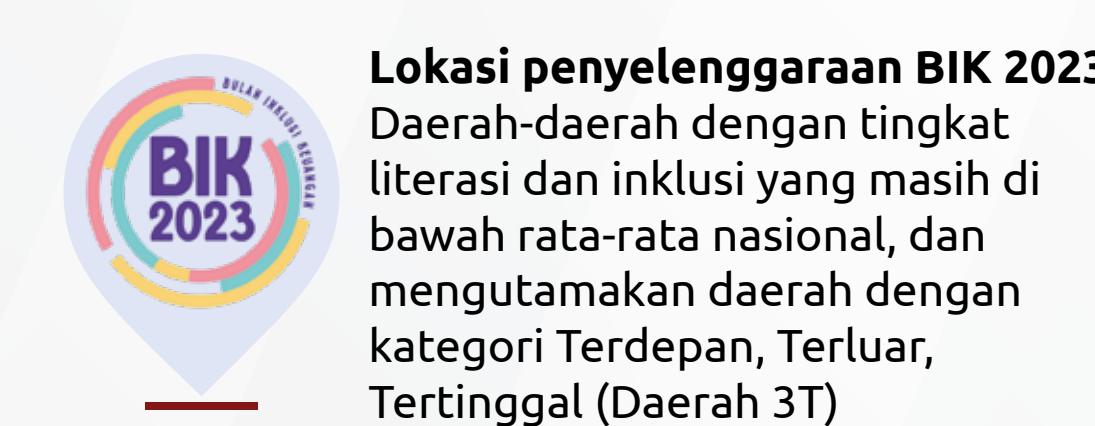


Program literasi dan edukasi keuangan

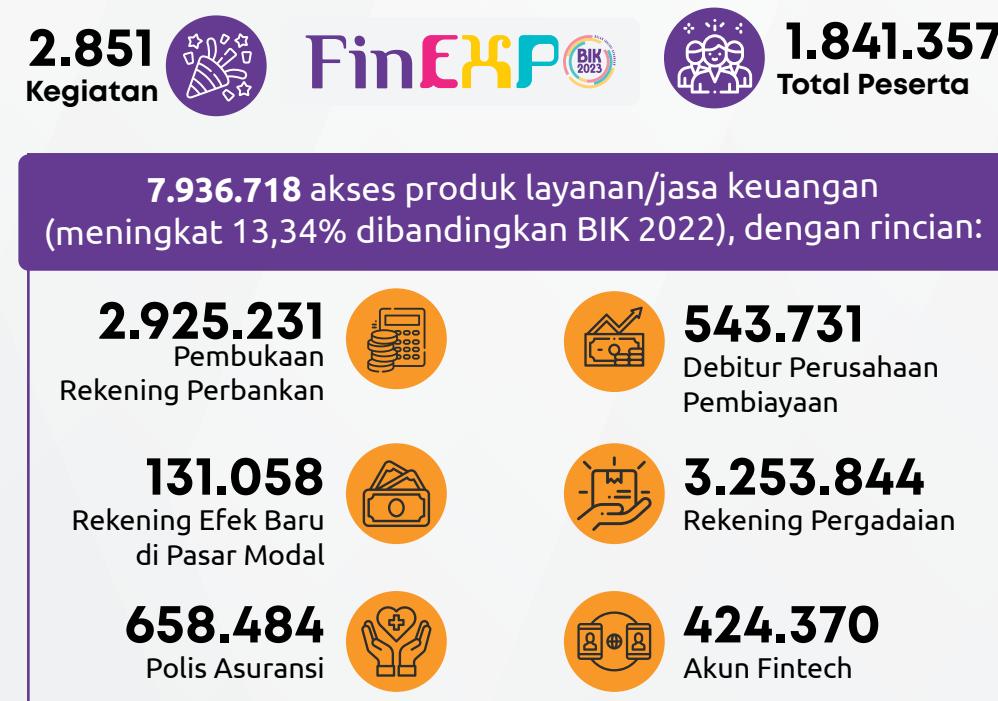


Januari s.d 29 Oktober 2023

Bulan Inklusi Keuangan



Pencapaian selama kegiatan BIK 2023



Data Januari s.d 27 Oktober 2023

Arah Kebijakan OJK

OJK mewaspadai kondisi ketidakpastian global dan dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut agar stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan sektor jasa keuangan dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian nasional OJK mengambil langkah kebijakan.



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- Meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mencermati risiko pasar serta senantiasa menjaga kecukupan modal dan memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
- OJK dan LJK secara berkala melakukan *stress test* untuk mengetahui tingkat ketahanan permodalan maupun ketahanan likuiditas.



Kebijakan Penguatan SJK dan Infrastruktur Pasar

- Menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, memperluas cakupan peraturan dalam hal jenis efek, tema keberlanjutan, dan mekanisme penerbitan efeknya.
- Menjalin kerja sama dengan *Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market* (FSRA-ADGM) untuk memperkuat kerja sama timbal balik dan pertukaran informasi antara dua lembaga khususnya untuk pengembangan Pasar Karbon.
- Dalam tahap finalisasi penyusunan RPOJK Pembiayaan Transaksi *Margin* dan/atau *Short Selling*.
- Mendukung komitmen ASEAN *Capital Markets Forum* (ACMF) dalam merealisasikan *roadmap* Pasar Modal berkelanjutan di ASEAN untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan di seluruh Kawasan. Terdapat 4 inisiatif utama yang telah dicapai selama keketuaan OJK dalam ACMF 2023.
- Meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransi Indonesia 2023-2027 dengan mengambil tema "*Restoring Confidence through Industrial Reform*".
- Sedang menyempurnakan ketentuan mengenai Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi sebagaimana dimandatkan UUP2SK.
- Tengah melakukan finalisasi atas penyempurnaan regulasi asuransi kredit, yang selama ini masih berjalan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2008.
- Berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan *Technical Committee Meeting* dan *Annual General Meeting* yang diselenggarakan oleh *International Organization of Pension Supervisors* (IOPS), dan *Global Private Pension Forum* yang diselenggarakan oleh IOPS dan *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
- Tengah menyusun *roadmap* pengembangan dan penguatan P2P *lending*.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- Sedang menyusun RPOJK Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha.
- Sedang menyusun RSEOJK tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik bagi Perusahaan Pembiayaan (PP) dan PP Syariah sesuai POJK Nomor 47/POJK.05/2020.
- Mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui penguatan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan prinsip syariah serta peningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
- Memperkuat literasi keuangan syariah pada Bulan Inklusi Keuangan di Oktober ini, dengan mengoptimalkan peran ibu sebagai duta literasi keuangan syariah melalui penyelenggaraan program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS).



Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)



- Sedang menyusun POJK dan ketentuan pelaksanaan di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan sebagai implementasi dari UU P2SK.
- Sedang menyusun panduan transisi terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Bappebti kepada OJK, untuk memastikan kelancaran proses transisi dan peralihan tugas tersebut.
- Melakukan koordinasi lanjutan dengan Bappebti terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam hal memetakan *cross-cutting issue* dalam hal koordinasi dan harmonisasi kebijakan dan pengaturan aset kripto.

Penguatan Tata Kelola OJK



- Mendorong penerapan dan penguatan *governance, risk management dan compliance* (GRC) di sektor jasa keuangan (SJK) melalui penyelenggaraan Forum Penguatan Audit Internal dengan industri keuangan non-bank, penguatan governansi kepada pemangku kepentingan di wilayah kerja kantor OJK, dan kerja sama dengan berbagai asosiasi profesi dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyempurnaan proses bisnis fungsi GRC di SJK.
- OJK dan Ombudsman RI menyepakati penguatan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di sektor jasa keuangan, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman.

Kebijakan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perhatian Khusus



- Penyidik OJK telah menyelesaikan total 115 perkara (90 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara IKNB).
Data 2014 s.d 27 Oktober 2023
- 89 perkara telah diputus oleh pengadilan (82 perkara *in kracht* dan 7 perkara tahap kasasi)
Data 2014 s.d 27 Oktober 2023

Ke depan, dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan kontribusi SJK dalam perekonomian nasional, OJK mempererat koordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan bekerja sama dengan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil.

Siaran Pers OJK Nomor SP 163/GKPB/OJK/X/2023

